

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah Industri Kecil Menengah yang sangat banyak, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Industri Kecil Menengah mendominasi struktur industri di Indonesia, sehingga jika dikembangkan secara intensif dan berkelanjutan, cepat atau lambat hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan industri yang berbasis masyarakat. Artinya, IKM diproduksi dan dikelola oleh masyarakat, maka hasil yang akan diperoleh pun berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Tabel 1.1 memperlihatkan data perkembangan UMKM pada periode 2010-2012.

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM 2010-2012
Di Indonesia

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012
1	Jumlah UMKM	Unit	53 823 732	55 206 444	56 534 592
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,01	2,57	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	99 401 775	101 722 458	107 657 509
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	3,32	2,33	5,83
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 282 571,80	1 369 326,00	1 504 928,20
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5,77	6,76	9,90
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	175 894,89	187 441,82	208 067,00
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	8,41	6,56	11,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, tahun 2012

Pada tahun 1998 Indonesia dilanda krisis moneter dan berakibat cukup parah bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya

perusahaan yang sudah berkembang besar di Indonesia mengalami kebangkrutan dan berkurangnya investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya krisis ini pemerintah harus meninjau ulang tentang kebijakan yang selama ini tertuju pada perusahaan besar untuk mengalihkan perhatian pada sektor industri kecil menengah.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 ternyata telah membuka cakrawala bangsa Indonesia tentang rapuhnya sistem ekonomi yang dibangun hanya dengan segelintir konglomerasi. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, pada masa orde baru perekonomian Indonesia dikuasai oleh 0,1 persen perusahaan besar dan hanya menyerap 2 persen dari seluruh angkatan kerja. Sementara itu kinerja IKM yang mampu menyerap 95 persen angkatan kerja atau kurang lebih 110 juta orang ternyata hanya menguasai sedikit sumber daya (Brata, 2003). Krisis ekonomi juga menyebabkan penurunan pertumbuhan PDRB riil Indonesia. Hal ini terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Etty Puji Lestari pada penelitiannya “Penguatan Ekonomi IKM Melalui Plat Form Klaster Industri”, dimana sebelum terjadinya krisis ekonomi, rata-rata pertumbuhan PDRB pada tahun 1996 berada diatas 5 persen per tahun, namun setelah terjadi gejolak ekonomi pada tahun 1997, dimana pertumbuhan PDRB menurun drastis dibawah angka nol atau pertumbuhannya negatif. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap guncangan yang terjadi dalam perekonomian.

Tambunan (2002) menyatakan, terutama pada masa krisis ekonomi, maka usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki tingkat kompetisi yang lebih baik dari pada usaha besar (UB). Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa pangsa output usaha besar terus mengalami penurunan, yakni dari 62.0 persen

pada dekade 1996 menjadi 45.7 persen pada rentang tahun 2000. Penurunan yang drastis terjadi pada saat krisis ekonomi, yakni sebesar 58.4 persen pada tahun 1997 menjadi 49.8 persen pada tahun 1998. Sementara itu, pangsa output usaha kecil (UK) dan usaha menengah (UM), masing-masing mengalami peningkatan dari 17.7 persen dan 20.3 persen pada 1996 menjadi 29.0 persen dan 25.3 persen pada rentang tahun 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa UK dan UM memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih baik dari UB.

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Industri Kecil Menengah juga merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Pertumbuhan IKM juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi.

Ada tiga alasan mengapa keberadaan IKM sangat diperlukan (Berry, Rodriquez & Sandeem, 2001) : *Pertama*, kinerja IKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, IKM sering meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan aktif mengikuti perubahan teknologi. *Ketiga*, IKM diyakini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan usaha besar.

Sedikitnya ada tiga keunggulan IKM yang tidak ditemukan dalam koperasi, yaitu : *Pertama*, modal usahanya yang kecil. Faktor modal yang kecil ini menjadikan alasan mengapa banyak yang berani mengambil resiko bisnis ini. *Kedua*, modal relatif kecil dan tidak banyak melibatkan banyak orang sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan cara improvisasi dalam memilih produk dan cara menghasilkannya. *Ketiga*, modal yang kecil dan improvisasi yang

dimilikinya ternyata memberi ciri IKM sebagai organisasi bisnis yang sangat fleksibel. Usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Usaha-usaha untuk meningkatkan daya saing IKM perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Realitanya bahwa suatu perekonomian yang ditopang oleh keberadaan IKM terbukti tahan terhadap guncangan-guncangan yang mengganggu stabilitas perekonomian. Pada beberapa negara maju seperti Jepang dan Italia, perhatian pemerintah terhadap keberadaan IKM sangat besar. Dukungan yang diberikan pemerintah terhadap IKM terbukti memperkuat sistem perekonomian mereka. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya pengaruh krisis ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut (Lestari, 2010).

Terbukti juga saat krisis global yang terjadi pada tahun 1998 lalu, IKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. IKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan ini jelas bahwa IKM dapat diperhitungkan dalam kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada (Departemen Koperasi, 2008).

Mengenai Industri Kecil Menengah, dari penelitian yang dilakukan Deny Kurniawan pada tahun 2009 di Kota Surabaya mengenai pertumbuhan industri kecil, ada empat faktor yang mempengaruhi jumlah IKM di Kota Surabaya, diantaranya adalah pendapatan perkapita, tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi. Keempat variabel tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jumlah industri kecil. Dari penelitian tersebut, penulis mengambil tiga

variabel dari faktor yang mempengaruhi jumlah IKM untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap jumlah IKM perikanan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan sepanjang garis pantai mencapai 104.000 km. Total luas laut Indonesia sekitar 3,544 juta km² (Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2010) atau sekitar 70 persen dari wilayah Indonesia. Keadaan tersebut seharusnya meletakkan sektor perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia.

Salah satu ruang yang memiliki potensi cukup besar dalam pembangunan wilayah di Indonesia adalah wilayah pesisir dan laut. Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang kaya dan beragam, baik sumber daya yang dapat diperbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu menurut Daryantao (2007), wilayah ini juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti transportasi, pelabuhan, industri, pemukiman dan pariwisata. Akan tetapi, jika pembangunan di wilayah pesisir tidak ditata dengan baik serta tanpa memperhatikan segenap aspek terkait, terutama aspek keseimbangan antara tingkat pembangunan dan daya dukung lingkungan serta keseimbangan pembangunan antar daerah, maka pembangunan tersebut tidak akan mencapai hasil yang optimal dan berkesinambungan.

Menurut Daryanto (2007), sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi untuk dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia

memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas mau pun diversitas. Kedua, industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan keempat, Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDBR ADHK) 2000 tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur, sub sektor perikanan terus mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan sub-sub sektor lainnya. Pada Sektor Basis Pertanian, meski pun sub sektor perikanan menempati urutan ke tiga setelah sub sektor tanaman bahan makanan dan peternakan, namun pertumbuhannya atau tingkat kenaikannya terbilang fluktuatif, yakni meningkat secara bertahap. Tabel 1.2 memperlihatkan data PDRB ADHK 2000 tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2
PDRB Sektor dan Sub Sektor Pertanian ADHK 2000
(Juta Rupiah) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2013

Sektor / Sub Sektor	2011	2012	2013
Pertanian	52.628.433,15	54.463.942,77	55.330.095,90
Tanaman Bahan Makan	28.774.273,14	29.602.961,48	29.912.980,00
Tanaman Perkebunan	7.456.131,01	7.632.728,73	7.728.647,13
Peternakan	9.009.563,08	9.341.723,33	9.438.365,01
Kehutanan	772.918,65	975.927,50	1.040.646,23
Perikanan	6.615.547,26	6.910.601,73	7.209.457,54

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka, tahun 2013

Tabel 1.2 memperlihatkan besaran sub sektor dalam sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur di tahun 2011-2013. Pada lima sub sektor tersebut, terlihat penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah sub sektor

tanaman bahan makan, kemudian peternakan, tanaman perkebunan, perikanan, dan urutan yang terakhir adalah kehutanan.

Pada tabel 1.2 terlihat jelas bahwa sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Meski pun sub sektor perikanan berada di peringkat ketiga tertinggi setelah tanaman bahan makanan dan peternakan, perikanan merupakan sub sektor penyumbang PDRB yang signifikan. Tingkat kenaikan pada sub sektor perikanan sebesar 4,46 persen di tahun 2012 dan sebesar 4,32 persen di tahun 2013, sedangkan pada sub sektor tanaman bahan makanan jumlah kenaikan sebesar 2,87 persen di tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 1,04 di tahun 2013, dan pada sub sektor peternakan mengalami peningkatan sejumlah 3,68 persen di tahun 2012 dan mengalami peningkatan sebanyak 1,03 persen di tahun 2013. Dari hal yang demikian terlihat bahwa sub sektor perikanan tidak mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan sub sektor lain pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur.

Melihat informasi yang disajikan pada tabel 1.2 bahwa perikanan termasuk sub sektor yang potensial, karena memperlihatkan pertumbuhan yang terus mengalami kenaikan secara bertahap, maka dapat dikatakan perikanan memiliki potensi untuk dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi (*primer over*). Hanya saja sub sektor perikanan kontribusi terhadap PDRB masih kecil. Hal tersebut perlu adanya strategi untuk meningkatkan kontribusi PDRB perikanan. Pada penelitian yang dilakukan Supomo (2008), menyatakan bahwa dengan menggunakan model klaster pada industri akan berhasil lebih besar dari pada pengembangan tanpa menggunakan klaster industri, karena dalam proses membangun suatu klaster industri akan melibatkan seluruh *stakeholders* yang

terkait, baik pelaku usaha inti, lembaga non pemerintah nir laba, lembaga pendukung, pelaku usaha sebagai industri pendukung, pembeli, dan seluruh dinas-dinas Pemda dimana masing-masing dinas tidak ada ego unit kerja. Kelebihan lainnya adalah bahwa semua pelaku usaha baik sebagai industri inti, pemasok, pedagang / pembeli, dan industri pendukung, semuanya mendapatkan informasi yang lebih akurat dan memperluas wawasan masing-masing pelaku usaha, sehingga masing-masing pihak akan bertindak / bersikap proporsional.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Sebaran Spasial Dan Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Industri Kecil Menengah Sub Sektor Perikanan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik permasalahan yakni :

1. Bagaimana sebaran spasial IKM perikanan yang terdapat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi terhadap jumlah IKM perikanan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sebaran spasial IKM perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2014.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah IKM perikanan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk dapat di jadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi regional yang berkelanjutan
2. Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja masing-masing sektor
3. Sebagai referensi bagi penulis lainnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan klaster perikanan di wilayah Provinsi Jawa Timur.